

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum adalah sebuah proses dilakukannya upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan menerapkan aturan tertentu kepada orang yang perbuatannya memenuhi syarat – syarat tertentu untuk dijatuhi hukuman. Norma hukum dalam masyarakat dianggap sebagai peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas<sup>1</sup>. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat – alat negara<sup>2</sup>.

Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan - hubungan hukum pada masyarakat, diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum<sup>3</sup>.

Hal ini bertujuan untuk terciptanya sebuah masyarakat ideal yang mematuhi hukum. Namun masyarakat yang seperti ini belum bisa

---

<sup>1</sup>Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 5

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal 33

<sup>3</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op.cit*, Hal 8

diwujudkan dikarenakan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang membuat sebuah negara menjatuhkan hukuman yang bengis sekaligus dapat membuat pelaku jera. Pidana merupakan salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang tingkat kejahatannya sudah tidak dapat di toleransi lagi. Masyarakat Indonesia dalam mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku, masih terbilang minim untuk ditaati. Sehingga dalam hal ini bergeraklah sistem pidana untuk menegakkannya.

Menurut Soedarto, dengan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang dilakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu, yang menurut Soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tertib<sup>4</sup> Akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana<sup>5</sup>.

Pasal 10 KUHP, dicantumkan pidana mati yang merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai saat sekarang ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Tongat, 2009, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Perpektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, Hal 12

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal 23 – 27

<sup>6</sup>Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Hal 6

Faktor – faktor yang dianggap mendukung dengan diadakannya pidana mati oleh Lembaga Internasional antara lain:

- a. Pidana mati adalah salah satunya pidana yang tepat dan adil bagi kejahatan – kejahatan yang berat yang sukar diampuni. Oleh karena itu pidana mati dapat dianggap paling tidak mempunyai efek menakutkan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.
- b. Dengan adanya penjahat yang bersangkutan tidak dieksekusi, maka akan selalu dapat melarikan diri penjara atau kalau pada sewaktu – waktu ia dibebaskan, ia akan dapat mengulangi perbuatan kejahatannya.
- c. Meskipun legitimasi pidana mati dipandang dari segi falsafah masih dapat dirugikan, namun dalam kenyataan kehidupan politik sehari – hari pidana mati sebagai alat merupakan Political Necessity yang tidak dapat diletakkan demi kelangsungan hidup masyarakat umum. Pendapat umum (*public opinion*) pada umumnya mendukung pidana mati, terutama para penegak hukum, khususnya para polisi dan petugas – petugas penjara<sup>7</sup>.

Secara umum, peraturan tentang pidana mati di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer dan teknisi atau pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>7</sup>Djoko Prakoso, 1987, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta, Penerbit Bina Aksara Hal 86

Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati yang hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Namun pada eksekusi pidana mati, masalah yang sangat penting dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati adalah kapan dilaksanakannya pidana mati kepada terpidana mati setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Masalahnya dalam peraturan perundang – undangan tidak ada yang menyebutkan adanya tenggat waktu pelaksanaan pidana mati baik itu menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Tenggat waktu dalam hal ini sejak putusan Mahkamah Agung hingga hari pelaksanaan putusan. Terpidana bisa mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menjelaskan bahwa “Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4”.

Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bahwa “Jika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum”. Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, bahwasanya terdapat ketidakjelasan dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana mati. Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya penambahan masa tahanan yang diberikan karena adanya jadwal kapan terpidana mati ini di eksekusi.

Sehingga dalam peraturan yang mengatur tentang eksekusi pidana, semestinya ada rekonstruksi guna memperbaiki kembali apa yang menjadi kendala. Rekonstruksi yang dimaksudkan disini adalah sebuah penyusunan kembali untuk mempertegas peraturan yang berlaku yang dulunya masih terdapat kekosongan hukum dan diubah untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Sesuai dengan permasalahannya, eksekusi pidana mati yang memiliki kekosongan hukum pada tenggat waktunya membuat masa tahanan atau masa hukuman para narapidana semakin bertambah. Perlunya rekonstruksi dalam hal ini pula di landasi dengan pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang

Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menyebutkan bahwa “Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4”.

Kendala yang terjadi dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer selaku peraturan materil dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati selaku peraturan formilnya tidak ada yang menyebutkan adanya tenggat waktu pelaksanaan pidana mati. Perlu dipahami yang dimaksudkan dengan tenggat waktu disini adalah sejak putusan Mahkamah Agung hingga pelaksanaan putusannya. Aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengalami dilematis disebabkan tidak adanya kejelasan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964, begitu juga dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi juga tidak menjelaskan tentang tenggat waktu pelaksanaannya. Pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang – Undang Nomor 5 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung pada pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”.

Hanya saja dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 *jo* Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pasal 2 ayat 1

menjelaskan bahwa sejak ditolaknya grasi<sup>8</sup>, setelah 30 hari harus segera dilaksanakan eksekusi mati. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi itu sangat diperlukan dalam eksekusi pidana untuk menciptakan kembali kepastian hukum tentang tenggat waktu eksekusi. Banyak kasus pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia yang dinilai kerap tidak sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan, yang dimana membuat para terpidana mati ini menunggu tanpa mengetahui kapan penderitaan mereka berakhir dan secara tidak langsung hal ini juga telah membuat makin panjangnya masa tahanan mereka dipenjara serta secara tidak langsung membuat psikis mereka tersiksa karena tidak mengetahui kapan mereka akan dieksekusi.

**JAKARTA** - Merry dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2002. Merry sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali (PK) pada 2014, tetapi ditolak. Merry diberitahu akan diikutkan dalam hukuman mati gelombang ketiga tahun 2016. Badar juga mengungkapkan, dari beberapa kasus terpidana mati yang ditangani oleh LBH Masyarakat, masih ditemukan kelemahan dalam proses penanganan perkaranya. Tidak terkecuali dalam kasus Merry. Merry mengalami kekerasan oleh petugas kepolisian saat pemeriksaan, mulai dipukul berkali-kali hingga dilecehkan. Kata Badar, Merry sempat dipaksa mengakui bahwa heroin tersebut miliknya.

Pengacara yang ditunjuk membantunya juga ikut memaksanya untuk mengaku bersalah dan hanya datang saat sidang saja. Badar juga menyebut dalam putusan pengadilan, hakim tidak bisa membuktikan bahwa kedua orang tersebut adalah pengedar. Selain itu, Badar mengungkapkan banyak terpidana hukuman mati yang tidak dipenuhi haknya seperti pendampingan oleh pengacara saat diperiksa. "Di persidangan tidak pernah

---

<sup>8</sup>Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden

ada bukti cukup yang menunjukkan Merri sebagai pengedar. Selain itu banyak terpidana mati yang tidak didampingi pengacara saat diperiksa," ungkap dia<sup>9</sup>.

Merry utami adalah terpidana mati dari kasus narkoba yang dimana pelaksanaan eksekusi matinya masih ditangguhkan padahal kasus merry utami sudah di sidangkan dan diputuskan oleh pengadilan negeri tahun 2004 dan mengajukan PK pada tahun 2014 namun ditolak, 30 hari setelah ditolaknya PK tersebut seharusnya merry utami sudah dieksekusi mati. Namun sampai tahun 2016 belum juga dieksekusi. Bukan hanya saja pada kasus Merry Utami saja, pada kasus Meirika Franola alias Ola alias Tania Fransisca Cumbe alias Rika Safitri juga terdapat penangguhan eksekusi pidana mati. Pada mulanya Ola dijatuhi pidana mati karena membawa 3,5 Kg heroin dan divonis hukuman mati.

Namun pada saat SBY memberikan grasi kepadanya yang hanya dihukum seumur hidup. Namun selama di bui Ola malah mengendalikan peredaran narkoba nasional. Setelah kejadian itu Pada kasus keduanya ini, Ola dituntut mati di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, 7 Januari 2015, selanjutnya majelis hakim memvonis nihil atas perkara Ola pada 2 Maret 2015. Atas putusan itu, jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Namun putusan PT Banten pada 18 Juni 2015 justru menguatkan vonis PN Tangerang, yakni nihil. Jaksa

---

<sup>9</sup>Kompas, *Antara Hidup dan Mati Kisah Merry Utami Terjerat Ancaman Eksekusi*, <http://kompas.com> diakses pukul 20:37 WIB Tanggal 1 Januari 2017



kemudian melakukan upaya hukum ke tingkat MA dengan mengajukan permohonan kasasi. Upaya ini berbuah putusan mati terhadap Ola<sup>10</sup>.

Kasus yang serupa pula, Rani Andriani alias Melissa Aprilia divonis pidana mati karena membawa 3,5 kg heroin. Dia divonis pada tahun 2000 oleh pengadilan tangerang. Pada tahun 2014 dia sempat mengajukan kasasi, namun hal tersebut ditolak oleh SBY. Rani juga sempat mengajukan banding, kasasi, sampai PK dan uji materi, yang dimana semua upaya hukum tersebut gagal dan Rani masih ditetapkan sebagai terpidana mati karena narkoba. Penangguhan eksekusi mati juga dirasakan oleh Freddy Budiman.

Freddy diketahui adalah salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Ia pertama kali ditangkap pada 2009 atas kepemilikan 500 gram methamphetamine. Ia kemudian divonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Pada 2011, ia kembali ditangkap atas kepemilikan ratusan gram methamphetamine dan peralatan untuk membuat narkoba, sehingga divonis 18 tahun penjara. Setahun kemudian, dari balik jeruji penjara, ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan divonis hukuman mati.

Ia juga ditangkap dalam kasus-kasus yang berbeda dalam kurun waktu 2013-2016 saat mengontrol pengiriman narkoba dari dalam penjara.<sup>11</sup> Namun dalam undang – undang 3 tahun 2009 tentang Mahkamah

---

<sup>10</sup>Tempo, *Divonis Mati MA, Gembong Narkoba Ola Dipindah ke LP Malang*, <http://www.tempo.co.id> diakses pukul 18.06 WIB Tanggal 4 Januari 2017

<sup>11</sup>Metro TV News, *Rani Andriani Terjerat Utang Berujung Hukuman Mati*, <http://metrotvnews.co.id> diakses pukul 18.06 WIB Tanggal 4 Januari 2017

Agung RI pada pasal 69 mengatakan bahwa “sejak adanya putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi sampai hari pelaksanaan putusan tenggang waktunya adalah 180 hari, kepada terpidana segera menggunakan hak upaya hukum luar biasa dan pengampunan grasi setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, segera diberitahukan kepada terpidana, tentang penjadwalan pelaksanaan pidana mati dalam waktu yang telah ditentukan”<sup>12</sup>.

Sebagaimana contoh kasus - kasus diatas, bahwasanya banyak terjadi penundaan eksekusi mati yang dimana membuat munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dapat di telaah dari peraturan – peraturan dan kasus – kasus yang terjadi, bahwa disini terjadi kesenjangan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Padahal, jika kita lihat lagi bahwa putusan untuk melaksanakan eksekusi pidana ini sudah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam hal ini penulis menyusun proposal penelitin huku, dengan judul “REKONSTRUKSI PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI YANG BERKEPASTIAN HUKUM”.

---

<sup>12</sup>Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 69

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia?
2. Apakah yang menjadi kelemahan dari aturan pelaksanaan eksekusi pidana mati ?
3. Bagaimana alternatif rekonstruksi aturan pelaksanaan pidana mati yang dapat memberi kepastian hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan aturan pelaksanaan eksekusi pidana mati
3. Untuk mengetahui alternatif rekonstruksi aturan pelaksanaan pidana mati yang dapat memberi kepastian hukum

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sebab ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dan dampak akan ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian berguna untuk memahami terkait dengan untuk mengetahui sebab dan dampak dari ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini bisa digunakan untuk mengupayakan agar masalah fenomena pelaksanaan eksekusi hukuman mati bisa dimengerti oleh masyarakat khususnya mahasiswa.

### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian, sedangkan Penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat<sup>13</sup>. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai

---

<sup>13</sup>Sidik Sunaryo, 2016, *Pedoman Penelitian Hukum*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 17

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>14</sup>.

## 2. Jenis Bahan hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang – undangan :

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang – undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum<sup>15</sup>.

### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>14</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal 118

<sup>15</sup>*Ibid* Hal 119

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia<sup>16</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan data/bahan hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian<sup>17</sup>.

### 4. Analisa data

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang normatif adalah secara kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas – asas, norma – norma doktrin dan pasal – pasal dalam undang - undang<sup>18</sup>. Selanjutnya diolah secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana Sistematika Penulisan disesuaikan dengan Sistematika Penulisan Hukum yang bentuknya disesuaikan dengan sistematika dalam buku pedoman yaitu berupa :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab ini pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 107

<sup>18</sup>Sidik Sunaryo, *Loc.cit*

judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penelitian, kerangka teori, sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan kerangka dasar teori penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori – teori yang ada, pendapat para ahli dan berbagai sumber yang mendukung dalam penelitian ini, bab ini secara umum berisi hal – hal yang berhubungan dengan eksekusi pidana mati.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok yang ada dalam penulisan skripsi ini. menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan mengenai bagaimana landasan hukum yang digunakan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.